

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Variabel yang digunakan pada penelitian ini merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel Dependen. Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel independen. Cakupan wilayah yang di gunakan pada penelitian ini merupakan sepuluh Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2015 sampai dengan 2020.

B. Perkembangan Variabel Penelitian

1. Perkembangan Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2005 : 249) (Nanga, 2005). Pengangguran sejatinya terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan (Putong, 2009 : 256) (putong iskandar, 2009). Seseorang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya. Dalam ilmu kependudukan, orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja (Rahardja dan Manurung, 2008 : 376) (rahardja prathama, 2008). Dalam pembangunan ekonomi suatu negara terdapat berbagai macam masalah. Salah satu aspek yang sering menjadi permasalahan adalah kesempatan kerja, dimana tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lamban menyebabkan masalah pengangguran di negara

berkembang menjadi semakin serius. Jumlah angkatan kerja yang banyak sebenarnya bukan merupakan masalah yang besar apabila daya dukung di negara tersebut mendukung untuk memenuhi penyediaan kesempatan kerja (Arsyad, 2010 : 358) (arsyad Lincholin, 2010).

Tingkat pengangguran sebagai variabel pengikat dalam penelitian yang menggambarkan tingkat pengangguran di Pulau Sumatera kurun waktu tahun 2015 sampai 2020 menunjukkan tingkat pengangguran beberapa Provinsi masih tergolong tinggi diatas tingkat pengangguran nasional. Pulau Sumatera memiliki sepuluh Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung.

Persentase tingkat pengangguran terendah dicapai pada tahun 2016 di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,60% termasuk pada tingkat pengangguran yang rendah. Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran di Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi se-Pulau Sumatera selama kurun waktu 2015 sampai 2020 yaitu sebesar 10,34%. Berikut ini merupakan perkembangan Tingkat Pengangguran sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera yang disajikan dengan persentase tingkat pengangguran. Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase tingkat pengangguran yang dilihat dari data Tingkat Pengangguran di Provinsi Pulau Sumatera dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang mengalami fluktuasi dari setiap provinsi dimana data diatas menunjukkan bahwa terdapat 5 Provinsi yang memiliki tingkat pengangguran yang masih tinggi di atas angka tingkat pengangguran di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel

4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Persentase Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi di Pulau
Sumatera Tahun 2015-2020 (Persen)

Provinsi	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACEH	9.93	7.57	6.57	6.36	6,17	6,59
SUMATERA UTARA	6.71	5.84	5.60	5.56	5,39	6,91
SUMATERA BARAT	6.89	5.09	5.58	5.55	5,38	6,88
RIAU	7.83	7.43	6.22	6.20	5,76	6,32
JAMBI	4.34	4.00	3.87	3.86	4,06	5,13
SUMATERA SELATAN	6.07	4.31	4.39	4.23	4,53	5,51
BENGKULU	4.91	3.30	3.74	3.51	3,26	4,07
LAMPUNG	5.14	4.62	4.33	4.06	4,03	4,67
KEP. BANGKA BELITUNG	6.29	2.60	3.78	3.65	3,58	5,25
KEP. RIAU	6.20	7.69	7.16	7.12	7,5	10,34

Sumber : BPS, 2015-2020. Tingkat Pengangguran Terbuka

2. Perkembangan Variabel Independen

a. Penanaman Modal Asing

Perkembangan penanaman modal asing atau disebut juga dengan investasi asing merupakan suatu kegiatan pemberian modal atau asset yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang berasal dari luar negeri (UU RI No. 25 Th 2007 Tentang Penanaman Modal). Perkembangan penanaman modal asing atau innvestasi tiap Provinsi yang ada di Indonesia selalu berbeda satu sama lainnya, hal ini disebabkan oleh perbedaan sumberdaya yang ada di setiap Provinsi, karena pada dasar nya investor melakukan kegiatan investasi di Indonesia karena melihat potensi masing masing wilayah, semakin tinggi sumberdaya yang di miliki oleh setiap Provinsi atau wilayah yang ada di Indonesia maka akan semakin besar

minat investor melakukan kegiatan investasinya dalam rangka pemanfaatan sumberdaya untuk keberlangsungan perputaran ekonomi (Jamil & Hayati, 2020). Keberlangsungan penanaman modal yang terjadi di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan berikut merupakan data persebaran Penanaman Modal Asing yang ada di sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera :

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Penanaman Modal Asing sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020 (Juta)

PROVINSI	INVESTASI					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACEH	21.2	134.5	23.2	71.2	137.5	51,10
SUMATERA UTARA	1246.1	1014.7	1514.9	1227.6	379.5	974,80
SUMATERA BARAT	57.1	79.3	194.4	180.8	157.1	125,60
RIAU	653.4	869.1	1061.1	1032.9	1034.0	1.078,00
JAMBI	107.7	61.0	76.8	101.9	54.6	27,00
SUMATERA SELATAN	645.8	2793.5	1182.9	1078.6	736.5	1543,8
BENGKULU	20.6	55.7	138.7	136.6	144.8	192,30
LAMPUNG	257.7	85.7	120.6	132.3	155.2	498,40
KEP. BANGKA BELITUNG	82.7	52.7	153.1	46.3	88.7	48,40
KEP. RIAU	640.4	519.1	1031.5	831.3	1363.4	1.649,40

Sumber : BPS, Penanaman Modal Asing 2015-2020

Pada table Perkembangan Penanaman Modal Asing 4.2 dalam kurun waktu 2015-2020 terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan penanaman modal yang dilakukan oleh orang asing, investasi terbesar terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2016 dengan nilai investasi sebesar Rp.2793.5 (juta), namun di tahun berikutnya Provinsi Sumatera Selatan terjadi penurunanan investasi asing

dengan nilai investasi sebesar 1182,9 (juta\$) di tahun 2017. Dari kurun waktu 6 tahun yaitu tahun 2015-2020 Provinsi yang nilai Investasi asingnya kecil berada pada Provinsi Bengkulu dengan angka investasi sebesar 20,5 (juta\$) pada tahun 2015. Namun pada tahun tahun berikutnya Provinsi Bengkulu selalu mengalami kenaikan angka investasi asing.

b. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan dari suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah, maupun dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut) Todaro (2003: 43). Produk Domestik Regional bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (Tarigan, 2005 : 18) (tarigan robinson, 2005). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau provinsi (Sukirno, 2014: 23) (Laksamana, 2016). Berikut ini adalah perkembangan produk domestik regional bruto pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2020 yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto pada sepuluh
Provinsi di Pulau Sumatera
Tahun 2015-2020 (Ribu Rupiah)

PROVINSI	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACEH	22524.31	22835.29	23362.90	24013.81	24587,82	24100,30
SUMATERA UTARA	31637.41	32885.09	34183.58	35570.71	37048,04	36300,55
SUMATERA BARAT	27080.76	28164.93	29310.69	30470.63	31649,98	30817,56
RIAU	70769.78	70569.36	70755.18	70740.08	71086,67	68743,48
JAMBI	36753.52	37728.80	38849.52	40051.65	41147,56	40362,74
SUMATERA SELATAN	31549.30	32699.50	34059.71	35670.00	37243,07	36781,73
BENGKULU	20302.48	21039.84	21751.64	22498.43	23267,68	22941,55
LAMPUNG	24581.78	25568.57	26614.82	27742.03	28928,50	28201,05
KEP. BANGKA BELITUNG	33480.38	34132.87	34934.71	35764.82	36231,00	34727,73
KEPULAUAN RIAU	78625.43	80295.60	79757.93	81295.31	83070,63	78038,02

Sumber : BPS, PDRB 2015-2020

Pada Tabel 4.3 menunjukkan perkembangan dari Produk Domestik Regional Bruto pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 sampai 2020 seluruh Provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari peningkatan PDRB dari tahun 2015 sampai 2020 PDRB tertinggi berada pada Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2019 dengan nilai ini sebesar Rp.8.307.630 (milyar). Sedangkan PDRB terendah berada pada Provinsi Bengkulu sebesar Rp.2.030.248 (milyar) pada tahun 2020.

c. Perkembangan Upah Minimum Provinsi

Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Definisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.

Selanjutnya upah minimum dibagi menjadi dua yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK). Situasi perburuhan yang sifat dan dinamikanya semakin kompleks di Indonesia, mengharuskan pemerintah mengatur upah minimum. Dasar kebijakan upah minimum diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, yaitu penetapan upah minimum didasarkan pada KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum di Indonesia ditetapkan dengan dua maksud. Pertama, untuk meningkatkan standar hidup buruh. Kedua, upah minimum sebagai jaring pengaman (*safety net*) yang bertujuan untuk melindungi pekerja dengan upah rendah, Upah minimum dimaksudkan sebagai jaring pengaman karena banyaknya tenaga kerja tidak terampil dan lemahnya serikat buruh sehingga memiliki *bargaining power* yang rendah. Upah minimum di Indonesia pada awalnya ditetapkan dengan berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Hukum yang mengatur upah minimum dibayarkan oleh maikan kepada pekerja adalah sebuah sumber perdebatan yang berkelanjutan. Untuk para pengikutnya Upah adalah balas jasa yang diberikan perusahaan/organisasi kepada para pekerja harian (pekerja tidak tetap) yang besarnya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, serta upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 2006 : 161) (mankiw, 2006a). Berikut ini adalah perkembangan upah minimum provinsi di Pulau

Sumatera kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2020 yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020
(Rupiah)

Provinsi	Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACEH	1.900.000	2.118.500	2.500.000	2.717.750	2.916.810	3.165.030
SUMATERA UTARA	1.625.000	1.811.875	1.961.354	2.132.188	2.499.422	2.499.422
SUMATERA BARAT	1.615.000	1.800.725	1.949.284	2.119.067	2.484.041	2.484.041
RIAU	1.878.000	2.095.000	2.534.673	2.755.443	2.888.563	2.888.563
JAMBI	1.710.000	1.906.650	2.358.454	2.563.875	2.630.161	2.630.161
SUMATERA SELATAN	1.974.346	2.206.000	2.266.722	2.464.154	3.043.111	3.043.111
BENGKULU	1.500.000	1.605.000	2.063.000	2.243.718	2.213.604	2.213.604
LAMPUNG	1.581.000	1.763.000	1.730.000	1.888.741	2.240.646	2.431.324
KEP. BANGKA BELITUNG	2.100.000	2.341.500	2.388.000	2.595.995	2.976.705	3.230.022
KEP. RIAU	1.954.000	2.178.710	1.908.447	2.074.673	2.769.683	3.005.383

Sumber: BPS, UMP 2015-2020

Pada Tabel 4.4 perkembangan upah minimum Provinsi di Pulau Sumatera kurun waktu 2015-2020 menunjukkan bahwa upah minimum provinsi Setiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali yang dialami oleh beberapa provinsi seperti Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu karena pada tahun 2019 sampai 2020 tidak mengalami perubahan karena pada tahun tersebut tidak ada perubahan penetapan upah minimum provinsi. Dilihat dari Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2015 sampai 2020 bahwa Upah Minimum Provinsi tertinggi pada tahun 2020 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 3.230.000 (Rupiah).

Sedangkan Upah Minimum Provinsi terendah pada tahun 2020 yaitu Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.213.604 (Rupiah).

d. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya, UNDP (*Human Development Report, 1995 :103*). Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan seseorang (Saputra, 2011) (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera kurun waktu 2012 sampai dengan 2020 yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera tahun
2015-2020 (Persen)

PROVINSI	INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACEH	69.45	70.00	70.60	71.19	71.90	71,99
SUMATERA UTARA	69.51	70.00	70.57	71.18	71.74	71,77
SUMATERA BARAT	69.98	70.73	71.24	71.73	72.39	72,38
RIAU	70.84	71.20	71.79	72.44	73.00	72,71
JAMBI	68.89	69.62	69.99	70.65	71.26	71,29
SUMATERA SELATAN	67.46	68.24	68.86	69.39	70.02	70,01
BENGKULU	68.59	69.33	69.95	70.64	71.21	71,40
LAMPUNG	66.95	67.65	68.25	69.02	69.57	69,69
KEP. BANGKA BELITUNG	69.05	69.55	69.99	70.67	71.30	71,47
KEPULAUAN RIAU	73.75	73.99	74.45	74.84	75.48	75,59

Sumber: BPS, IPM 2015-2020

Pada Tabel 4.5 menunjukkan perkembangan dari Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera dari tahun 2015 sampai 2020 dalam setiap tahunnya indeks pembangunan manusia pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera selalu mengalami peningkatan. Nilai indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2020 berada pada Provinsi kepulauan Riau dengan nilai Presentasi Indeks Pembangunannya sebesar 75,59 % dan yang terendah berada pada Provinsi Lampung dengan nilai presentasi indeks pembangunan manusia sebesar 69,69% .

C. Hasil Analisis Model

Permodelan dalam menggunakan teknik regresi data panel dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya, pendekatan-pendekatan tersebut yaitu *Pooled Least Square / Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

1. Pemilihan Estimasi Model

Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam analisis model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary / pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (Random Effect), pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan melakukan uji chow untuk menentukan apakah metode *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect* yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel dan yang kedua dengan menggunakan Uji Hausman untuk menentukan apakah metode *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.

a. Hasil Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah metode *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan dipilih untuk mengestimasi data. Kriteria pengambilan keputusan pada uji chow yaitu, jika *Prob. Cross-section Chi Square* < *alpha* (5%) maka *Fixed Effect Model* yang dipilih, atau jika *Prob Cross-Section Chi Square* > *alpha* (5%) maka *Common Effect Model* yang dipilih. Hipotesis yang dibentuk uji chow adalah sebagai berikut :

Uji hipotesis statistik:

$H_0 : P_{\text{value}} > \alpha$ Model *common effect*

$H_1 : P_{\text{value}} < \alpha$ Model *Fixed effect*.

Tabel 4.6

Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.956576	(9,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	60.564258	9	0.0000

Sumber : Hasil pengolahan melalui eviews 8, lampiran

Berdasarkan hasil uji *chow* diatas dengan taraf signifikansi sebesar α (0,05) dapat diketahui bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar $0.000 < 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dan dianggap mempresentasikan karakteristik data adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Hasil Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang akan dipilih untuk mengestimasi data. Kriteria pengambilan keputusan pada uji hausman yaitu, jika *Prob. Cross-section Random* $< \alpha$ (0,05%) maka *Fixed Effect Model* yang dipilih, atau jika *Prob.Cross-section Random* $> \alpha$ (0,05) maka *Random Effect Model* yang dipilih.

Uji hipotesis statistik:

$H_0 : p_{\text{value}} > \alpha$ Model *Random Effect*

$H_1 : p_{\text{value}} < \alpha$ Model *Fixed Effect*

Tabel 4.7

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.835864	4	0.0021

Sumber : Hasil pengolahan melalui Eviews 8, lampiran

Berdasarkan hasil uji Hausman diatas, dengan taraf signifikansi sebesar alpha (0,05) dapat diketahui bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar $0.0021 < \alpha$ (0,05%), maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dan dianggap mempresentasikan karakteristik data adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Hasil Estimasi Model

Estimasi hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Fixed Effect Model dengan Cross-section Weight. Metode tersebut pada data panel digunakan untuk mengatasi galat pada model yang berbeda saling berkorelasi (autokorelasi).

Tabel 4.8

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient
C	82.32164
INV	-0.310302
GRDP	-10.25253
WAGE	2.102201
IHDI	0.026025

Sumber : Hasil pengolahan melalui Eviews 8, lampiran

Berdasarkan hasil regresi data panel diatas dapat dituliskan dalam bentuk model persamaan sebagai berikut :

$$\text{UNEM}_{it} = 82.32164 - 0.310302\text{INV}_{it} - 10.25253\text{GRDP}_{it} + 2.102201\text{WAGE}_{it} + 0.026025\text{HDI}_{it} + \varepsilon_{it}$$

UNEM = Tingkat Pengangguran Terbuka

INV = Penanaman Modal Asing

GRDP = Produk Domestik Regional Bruto

HDI = Indeks Pembangunan Manusia

WAGE = Upah Minimum Provinsi

ε = Error

i = Banyaknya Observasi (Cross-section)

t = Waktu

Dalam model regresi yang menggunakan Fixed Effect Model (FEM) yang menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing dan Produk Domestik Regional Bruto terdapat pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, kemudian untuk Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera.

3. Hasil Estimasi Model Cross-section

Setelah didapat model terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM), maka hasil regresi diperoleh koefisien pada tiap-tiap cross-section untuk setiap provinsi (*cross-section*) yang diteliti. Hal ini dapat dilihat dari nilai konstanta pada masing-masing Provinsi yang diteliti oleh penulis. Adapun nilai-nilai dari setiap konstanta sebagai berikut :

Tabel 4.9**Nilai Intersep (Konstanta) pada tingkat Provinsi di Pulau Sumatera**

Variabel	Koefesien (Ci)	Koefesien (C)	Ci+C
ACEH	-3,480432	82.32164	78,841208
BANGBEL	-2,435217	82.32164	79,886423
BENGKULU	-7,002672	82.32164	75,318968
JAMBI	-0,924508	82.32164	81,397132
KEPRIAU	10,518814	82.32164	92,840454
LAMPUNG	-3,867645	82.32164	78,453995
RIAU	8,072650	82.32164	90,39429
SUMBAR	-1,785441	82.32164	80,536199
SUMSEL	-0,840938	82.32164	81,480702
SUMUT	0,578954	82.32164	82,900594

Sumber : Pengolahan data

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel FEM Cross-section Weight dapat diketahui bahwa setiap Provinsi memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda, hal ini menunjukkan bahwa setiap Provinsi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketimpangan tingkat pengangguran di setiap Provinsi yang diteliti penulis dalam penelitian ini. Tentunya hasil konstanta masing-masing daerah yang diteliti (Ci) dijumlahkan dengan hasil konstanta umum (C) pada persamaan model panel dengan metode *Fixed Effect Model (FEM) Cross-section Weights* yang ada menghasilkan nilai konstanta kontribusi (Ci+C). Adapun persamaan model tiap daerah (*cross-section*) yang diteliti beserta penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh

$$\text{UNEM_ACEH} = 78.841208 - 0.310302\text{INV_ACEH} - 10.25253\text{GRDP_ACEH} + 2.102201\text{WAGE_ACEH} + 0.026025\text{HDI_ACEH}$$

Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran terbuka pada periode 2015 – 2020 mengalami kenaikan sebesar 78,841208.

2. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bangka Belitung

$$\text{UNEM_BANGBEL} = 79,886423 - 0.310302\text{INV_BANGBEL} - 10.25253\text{GRDP_BANGBEL} + 2.102201\text{WAGE_BANGBEL} + 0.026025\text{HDI_BANGBEL}$$

Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran terbuka pada periode 2015 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 79,886423.

3. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu

$$\text{UNEM_BENGKULU} = 75,318968 - 0.310302\text{INV_BENGKULU} - 10.25253\text{GRDP_BENGKULU} + 2.102201\text{WAGE_BENGKULU} + 0.026025\text{HDI_BENGKULU}$$

Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran

terbuka sendiri pada periode 2015 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 75,318968.

4. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi

$$\text{UNEM_JAMBI} = 81,397132 - 0.310302\text{INV_JAMBI} - 10.25253\text{GRDP_JAMBI} + 2.102201\text{WAGE_JAMBI} + 0.026025\text{HDI_JAMBI}$$

Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran terbuka pada periode 2015 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 81,397132.

5. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau

$$\text{UNEM_KEPRIAU} = 92,840454 - 0.310302\text{INV_KEPRIAU} - 10.25253\text{GRDP_KEPRIAU} + 2.102201\text{WAGE_KEPRIAU} + 0.026025\text{HDI_KEPRIAU}$$

Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran terbuka pada periode 2015 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 87,21741.

6. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung

$$\text{UNEM_LAMPUNG} = 78,453995 - 0.310302\text{INVLAMPUNG} - 10.25253\text{GRDP_LAMPUNG} + 2.102201\text{WAGE_LAMPUNG} + 0.026025\text{HDI_LAMPUNG}$$

Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta

upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran terbuka pada periode 2015 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 78,453995.

7. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau

$$\text{UNEM_RIAU} = 90,39429 - 0.310302\text{INV_RIAU} - 10.25253\text{GRDP_RIAU} + 2.102201\text{WAGE_RIAU} + 0.026025\text{HDI_RIAU}$$

Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran terbuka pada periode 2015 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 90,39429.

8. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat

$$\text{UNEM_SUMBAR} = 80,536199 - 0.310302\text{INV_SUMBAR} - 10.25253\text{GRDP_SUMBAR} + 2.102201\text{WAGE_SUMBAR} + 0.026025\text{HDI_SUMBAR}$$

Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran terbuka pada periode 2015 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 74,922998.

9. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan

$$\text{UNEM_SUMSEL} = 81,40702 - 0.310302\text{INV_SUMSEL} - 10.25253\text{GRDP_SUMSEL} + 2.102201\text{WAGE_SUMSEL} + 0.026025\text{HDI_SUMSEL}$$

Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta

upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran terbuka pada periode 2015 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 81,480702.

10. Model analisis dari tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara

$$\text{UNEM_SUMUT} = 82.900594 - 0.310302\text{INV_SUMMUT} - 10.25253\text{GRDP_SUMUT} + 2.102201\text{WAGE_SUMUT} + 0.026025\text{HDI_SUMUT}$$

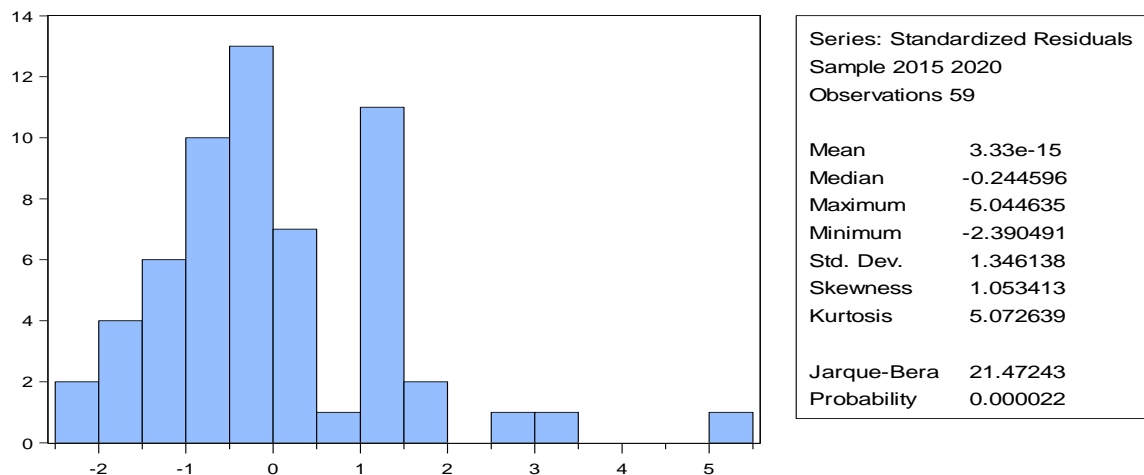
Persamaan tersebut memberikan pengertian bahwa ketika variabel produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta upah minimum provinsi bernilai konstanta maka variabel tingkat pengangguran terbuka pada periode 2015 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 82,900594.

D. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi frekuensi dari data yang diamati apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Untuk menguji suatu data terdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan uji statistik $JB\text{-Square} < Chi\text{-Square table}$ maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal begitupun sebaliknya (Gujarati, 2015 : 406).

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas



Sumber : hasil pengolahan Eviews 8

Berdasarkan Gambar dapat dilihat bahwa nilai *Jarque-Bera* sebesar 21,47243. Bila dibandingkan dengan nilai *Chi-Square Tabel* 72,15328612 artinya nilai $JB < Chi-Square Tabel$ $21,47243 < 72,15328612$ data berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

E. Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik sebenarnya variabel independen tidak terjadi korelasi (Gujarati, 2015 : 408) (Gujarati N Damodar, 2015) untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dilakukan uji korelasi antar variabel independen yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4.10

Hasil Matriks Korelasi

	LN_PMA	LN_PDRB	LN_UPH	IPM
LN_PMA	1.000000	0.584132	0.122794	0.322420
LN_PDRB	0.584132	1.000000	0.273448	0.543784
LN_UPH	0.122794	0.273448	1.000000	0.437971
IPM	0.322420	0.543784	0.437971	1.000000

Sumber : hasil pengolahan data melalui Eviews 8

Berdasarkan Gambar 4.10 dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,80. Dengan ketentuan *correlation matriks* < 0,8 maka diantara variabel independen yaitu Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Regional Bruto, upah minimum provinsi serta indeks pembangunan manusia tidak terdapat multikolinieritas (Gujarati, 2015 : 408) (gujarati N damodar, 2015).

2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain tetap atau disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas, dalam pengamatan data panel dalam *eviews*, menggunakan metode *General Least Square (cross-section Weights)*.

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan membandingkan *Chi-Square* table. Jika *Chi-Square* hitung < *Chi-Square* table,

maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Artinya lolos uji heteroskedastisitas. Berikut adalah olahan data untuk pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan program *eviews 8*.

Tabel 4.11
Hasil Uji Heterokedastisitas

Jumlah data (n)	<i>R-Squared</i>	Jumlah variabel	<i>Chi-Square</i> hitung (n x <i>R-squared</i>)	<i>Chi-square Tabel</i>	Hasil
59	0,794416	5	46,870544	72,15328612	Tidak Terjadi heterokedastisitas

Sumber : hasil pengolahan data melalaui *eviews 8*

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai *R-squared* pada *output* regresi data panel FEM. Dapat dilihat pada *Chi-square hitung* < *chi-square tabel* atau $46,870544 < 72,15328612$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah heterokedastisitas.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Menurut Gujarati dan Porter (2015:86) autokorelasi bias didefinisikan sebagai korelasi diantara anggota observasi yang diurut menurut waktu seperti (data deret berkal) atau ruang (seperti data lintas-sektoral). Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini disebabkan karena “gangguan” pada seorang individual atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama periode berikutnya. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan

Chi Square Hitung dengan Chi Square Tabel, dimana angka Chi Square hitung didapat dari banyaknya jumlah data penelitian (n) dikali dengan nilai R-square. Bila nilai Chi Square Hitung lebih kecil dari nilai Chi Square Tabel maka lolos autokorelasi.

Tabel 4.12

Uji Autokorelasi

R-Square	N	Chi Square Hitung	Chi Square Tabel
0,794416	59	46,870544	72,15321612

Pada table 4.9 terlihat bahwa nilai Chi Square Hitung (72,15328612) lebih kecil dari nilai Chi Square Tabel (46,870544) maka kesimpulannya adalah tolak H_0 , tidak terdapat autokorelasi.

F. Hasil Uji Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis statistik merupakan pengujian terhadap hipotesis statistik yang akan menghasilkan suatu keputusan dalam menerima atau tidak menerima hipotesis statistik. Jika tidak menerima hipotesis nol atau H_0 maka penelitian yang dilakukan secara statistik keputusannya adalah berpengaruh dan jika tidak menolah hipotesis nol atau H_1 maka keputusan hasil penelitian tersebut secara statistik tidak berpengaruh

1. Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Tabel 4.13

Hasil Uji t

Variabel	t-statistik	t-tabel	Prob.	Hasil
Penanaman Modal Asing	-2.065086	-2,00404	0.0447	Tolak H ₀ , Signifikan
Produk Domestik Regional Bruto	-3,373442	-2,00404	0.0015	Tolak H ₀ , Signifikan
Upah Minimum	2.004600	2,00404	0.0510	Tolak H ₀ , Tidak Signifikan
Indek Pembangunan Manusia	0.543038	2,00404	0.5898	Terima H ₀ , Tidak Signifikan

Sumber : hasil pengolahan data melalui Eviews 8

a. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

$$UNEM_{it} = 0.0004 + 0.0447 PMA_{it} + 0.0015 PDRB_{it} + 0.0510 UMP_{it} + 0.5898 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

H₀ : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada Sepuluh Provinsi di Pulau

Sumatera tahun 2012 – 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_0 : \beta_1 \neq 0$, Terdapat pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012 – 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan :

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak. Sebaliknya jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima. Dan apabila nilai probabilitasnya $< = (5\%)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan nilai estimasi nilai $t_{\text{statistik}}$ Penanaman Modal Asing lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $-2,065086 > -2,00404$ dengan nilai probabilitasnya $t_{\text{statistik}} \beta_1 (0.0447) < = (5\%=0,05)$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh dari penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan angka sebesar 4,47 % dan lebih kecil dari alpha yang sebesar 5% pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

b. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

$$UNEM_{it} = 0.0004 + 0.0447 PMA_{it} + 0.0015 PDRB_{it} + 0.0510 UMP_{it} + 0.5898 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

$H_0 : \beta_2 = 0$, Tidak terdapat pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka pada sepuluh Provinsi

di Pulau Sumatera tahun 2015 – 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_0 : \beta_2 \neq 0$, Terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 – 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan Keputusan :

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak. Sebaliknya jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima. Dan apabila nilai probabilitasnya $\leq (5\%)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi nilai t_{hitung} Produk Domestik Regional Bruto lebih besar dari pada t_{tabel} yaitu sebesar $-3,373442 < -2,00404$ dengan nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} \beta_2 (0,0015) < (5\% = 0,05)$, Maka H_0 diterima. Artinya terdapat pengaruh secara signifikan dari variable produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka yang mana memiliki angka pengaruh sebesar 0,15 % dan lebih kecil dari alpha yang besarnya 5% terhadap tingkat pengangguran pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

c. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

$$\text{UNEM}_{it} = 0.0004 + 0.0447 \text{PMA}_{it} + 0.0015 \text{PDRB}_{it} + 0.0510 \text{UMP}_{it} + 0.5898 \text{IPM}_{it} + \varepsilon_{it}$$

$H_0 : \beta_3 = 0$, Tidak terdapat Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 – 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_0 : \beta_3 \neq 0$, Terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 – 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan :

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak. Sebaliknya jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima. Dan apabila nilai probabilitasnya $< = (5\%)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan nilai estimasi nilai $t_{\text{statistik}}$ jumlah penduduk lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2.004600 > 2,00404$ dengan nilai probabilitasnya $t_{\text{statistik}} \beta_3 (0.0497) < = (5\%)$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh namun tidak signifikan dari variabel upah minimum provinsi sebesar 5,10 % yang mana hasil ini menunjukkan pengaruh karena nilai t statistic lebih besar dari t table namun pengaruhnya tidak signifikan karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alpha 5% terhadap tingkat pengangguran terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

d. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

$$UNEM_{it} = 0.0004 + 0.0447 PMA_{it} + 0.0015 PDRB_{it} + 0.0510 UMP_{it} + 0.5898 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

$H_0 : \beta_4 = 0$, Tidak terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 – 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_4 \neq 0$, Terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 – 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Pengambilan keputusan :

Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak. Sebaliknya jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} > -t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima. Dan apabila nilai probabilitasnya $\leq (5\%)$, maka berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil estimasi t_{hitung} Indeks Pembangunan Manusia $0.543038 < 2,00404$ dengan nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} \beta_4 (0.5898) > (5\% = 0,05)$, Maka H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang mana pengaruh indeks pembangunan manusia sendiri memiliki hasil yaitu 58,98 % yang mana angka tersebut lebih besar dari nilai alpha pada penelitian ini yaitu sebesar 5 %. Dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

2. Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dengan hipotesis statistik simultan sebagai berikut :

$H_0 : \beta_i = 0$, Tidak terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan indeks pembangunan manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 sampai 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

$H_1 : \beta_i \neq 0$, Terdapat pengaruh antara Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 sampai 2020, dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

Adapun hasil pengolahan data uji hipotesis statistik simultan sebagai berikut :

Tabel 4.14

Hasil Uji Statistik F

F-Statistik	F-Tabel	Prob.	Taraf signifikansi α	Hasil
13,37603	2,540	0.0004	0,05	Tolak H_0 , signifikan

Sumber : hasil pengolahan data melalui Eviews 8

Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015 – 2020 yang menggunakan = 5% (0,05) dengan *degree of fredom for numerator*

($dfn = k-1 = 5 - 1 = 4$) dan *degree of freedom for numerator* ($dfd = n - k = 59 - 4 = 55$) maka diperoleh F-tabel sebesar 2,540, jika $F_{statistik} > F_{tabel}$ maka tolak H_0 . Dari hasil regresi pengaruh produk domestik regional burto, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk serta upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka diperoleh $F_{statistik}$ sebesar $13,37603 > F_{tabel}$ sebesar 2,540 dan nilai probabilitas $F_{statistik}$ $0.0004 < \alpha (0,05)$, maka tolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa variabel Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia, berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka karena nilai $F_{statistik}$ lebih besar dari nilai F_{tabel} , dengan asumsi variabel lain dianggap *ceteris paribus*.

G. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menginformasikan seberapa baik sebuah garis regresi sampel dengan nyatanya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, maka akan semakin kecil pengaruh semua variabel independen Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera yang diteliti tahun 2015-2020.

Sebaliknya, semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin besar pengaruh semua variabel independen

Penanaman Modal Asing, Produk Domesti Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera yang diteliti periode tahun 2015-2020. Berikut adalah besarnya koefisien determinasi hasil pengolahan data.

Tabel 4.15

Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	<i>0.794416</i>
-------------------------	------------------------

Sumber : hasil pengolahan data melalui Eviews 8

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.15 diperoleh nilai R-squared (R^2) sebesar 0.794416 atau 79,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia) mampu menjelaskan perubahan dari Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.794416 pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera yang diteliti periode tahun 2015 – 2020. Dapat juga dikatakan bahwa Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia, mempunyai pengaruh 79,44 persen terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Sedangkan sisanya 20,56 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan kedalam model estimasi regresi data panel dalam penelitian ini.

H. Pembahasan

1. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada penelitian ini. Variabel Penanaman Modal Asing menunjukkan adanya pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015 sampai dengan 2020. Penanaman Modal Asing dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dibuktikan dari hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $-2,065086 > -2,00404$ dengan probabilitasnya sebesar $0,0447 < \alpha (0,05)$. Kenyataan ini karena provinsi-provinsi di Pulau Sumatera angka Penanaman Modal Asingnya berbeda beda, seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 yang memperlihatkan perbandingan antar Provinsi yang setiap tahun mengalami peningkatan dan dari 6 tahun data penelitian yang peneliti gunakan jumlah Penanaman Modal Asing tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 dan dilihat dari data table diatas Penanaman Modal Asing terendah yaitu Provinsi Bengkulu tahun 2015, yang berpengaruh pada Tingkat Pengangguran di setiap daerah yang bisa dilihat dari data Tingkat Pengangguran yang mana setiap tahun setiap Provinsi selalu mengalami penurunan, yang mana artinya apabila Penanaman Modal Asing mengalami peningkatan maka angka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan pada setiap Provinsi yang ada di Pulau Sumatera periode tahun 2015 sampai 2020, karena dengan naiknya angka penanaman modal asing akan mengakibatkan menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada penelitian ini. Variabel produk domestik regional bruto menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera periode tahun 2015 sampai dengan 2020. Produk domestik regional bruto dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka pada sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012 sampai 2020 dibuktikan dari hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $-3,373442 > -2,00404$ dengan probabilitasnya sebesar $0.0015 < \alpha (0.05)$. Kenyataan ini karena provinsi-provinsi di Pulau Sumatera memiliki produk domestik regional bruto di setiap provinsi berbeda, seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.3 yang memperlihatkan perbandingan antar Provinsi yang setiap tahun mengalami peningkatan dan dari 6 tahun data penelitian yang peneliti gunakan, jumlah PDRB tertinggi pada tahun 2015-2020 berada pada Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 dan PDRB terendah berada pada Provinsi Bengkulu tahun 2015 hal tersebut berpengaruh pada Tingkat Pengangguran di setiap daerah yang bisa dilihat dari data Tingkat Pengangguran yang mana setiap tahun setiap Provinsi selalu mengalami penurunan, artinya apabila produk domestik regional bruto mengalami peningkatan maka angka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan pada setiap Provinsi yang ada di Pulau Sumatera periode tahun 2015 sampai 2020, karena dengan naiknya angka produk domestik regional bruto akan mengakibatkan menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka di daerah.

Dan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tengko Sarimuda RB, Soekarnoto (2014) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, dimana penelitian ini $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $-3,37442 > -2,00404$ dengan probabilitas sebesar $0.0015 < \alpha (0.05 = 5\%)$.

Hasil ini sesuai dengan teori Hukum Okuns yang menyatakan bahwa bahwa apabila terjadi kenaikan PDRB disuatu daerah maka penyerapan tenaga kerja didaerah tersebut juga akan meningkat yang berdampak pada penurunan jumlah pengangguran.

3. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Mankiw (2006) (mankiw, 2006b) Upah adalah balas jasa yang diberikan perusahaan/organisasi kepada para pekerja harian (pekerja tidak tetap) yang besarnya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, serta upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Menurut Salvastore (2007) (Sataloff et al., n.d.) Gagalnya upah melakukan penyesuaian agar penawaran dan permintaan tenaga kerja sama. Jika kebijakan upah minimum diterapkan diatas tingkat keseimbangan maka terjadi kekurangan upah, dimana upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh Upah. Pada penelitian ini dilihat pada tabel 4.4 yang menampilkan adanya kenaikan Upah Minimum pada setiap Provinsi di Pulau Sumatera dari periode tahun 2015 sampai dengan periode 2020 yang

menjelaskan bahwa Upah Minimum di Pulau Sumatera dapat dilihat dari table 4.4 dimana Upah Minimum Provinsi tertinggi di Pulau Sumatera tahun 2020 berada pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan besaran Upah Rp.3.230.000. yang merupakan tertinggi diantara Provinsi lainnya, dan sedangkan Upah Minimum Provinsi terendah pada periode tahun 2020 yaitu Provinsi Bengkulu dengan besaran upah Rp.2.213.604. dapat dikatakan bahwa Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera memiliki perbedaan antar Provinsi dan setiap tahun mengalami kenaikan serta dilihat pada tabel 4.4 pada Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu karena pada tahun 2019 sampai 2020 tidak mengalami perubahan karena pada tahun tersebut tidak ada perubahan penetapan upah minimum provinsi. dilihat dari hasil hipotesis Uji Statistik t (Parsial) dari pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka yang memiliki hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2.004600 > 2,00404$ dengan nilai probabilitas $t_{statistik} \beta_3$ sebesar (0,0510) lebih kecil dari alpha 5% (0,05). yang berarti $(0,0510) > 0,05$ maka H_0 ditolak tidak signifikan.

Penelitian ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya Hasan Basri dkk (2019) Analisis Pengaruh Ump, Inflasi, Ipm, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Jambi dalam penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Todaro (2003) (todaro and smith, 2003), Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas dapat mempengaruhi kesempatan kerja yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas maka terjadi penurunan biaya produksi per unit barang. Penurunan biaya produksi per unit barang akan menurunkan harga per unit barang. Jika harga barang turun maka permintaan terhadap barang naik yang akan mendorong pengusaha untuk menambah permintaan tenaga kerja, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Pada penelitian ini variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan tidak adanya pengaruh karena H_0 diterima dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan hasil yang dilihat pada output eviews yang menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0.543038 < 2,00404$ dengan probabilitas $t_{statistik}$ sebesar $0.5898 > \alpha$ ($5\% = 0,05$). Data Indeks Pembangunan Manusia yang berbeda-beda dan selalu mengalami penurunan yang relatif rendah, dan Indeks Pembangunan Manusia terbesar di Pulau Sumatera berada pada Provinsi Riau dengan nilai presentasi IPM sebesar 75,59%. Provinsi yang lain memiliki

hasil data yang relatif sama antara provinsi satu dan yang lainnya yang dapat dilihat dari tabel 4.5.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Balqis Zahra Bahasoan (2019) dalam penelitiannya dimana variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh dan Tidak Signifikan.